

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1.1.1 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan analisis peneliti mengenai implementasi kebijakan pengelolaan retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dikabupaten Lombok utara yaitu:

1. Komunikasi belum berjalan optimal, dimana penyebaran komunikasi belum berjalan dengan baik. Adapun indikator-indikator yang dikemukakan oleh para ahli belum sepenuhnya berjalan dengan baik antara satu dengan yang lain masih adanya distorsi yang menyebabkan terjadinya bias komunikasi, ketidakmampuan dalam memahami suatu kebijakan. selain itu juga, konsistensi yang dimiliki dinas perhubungan terkait pemungut retribusi parkir dalam melakukan kewenangannya mengimplemetasikan kebijakan retribusi parkir belum berjalan efektif, oleh karena ada bagian-bagian dalam kebijakan belum dilaksanakan.
2. Sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia/aparatur, anggaran dan peralatan yang belum terpenuhi dan memadai dalam melakukan suatu implementasi kebijakan.
3. Disposisi yang ada didinas perhubungan sudah berjalan dengan baik, akan tetapi karena masih kurangnya kemampuan, pengetahuan dan

pengalaman dari sumber daya manusia mengakibatkan disposisi belum bisa berjalan dengan baik.

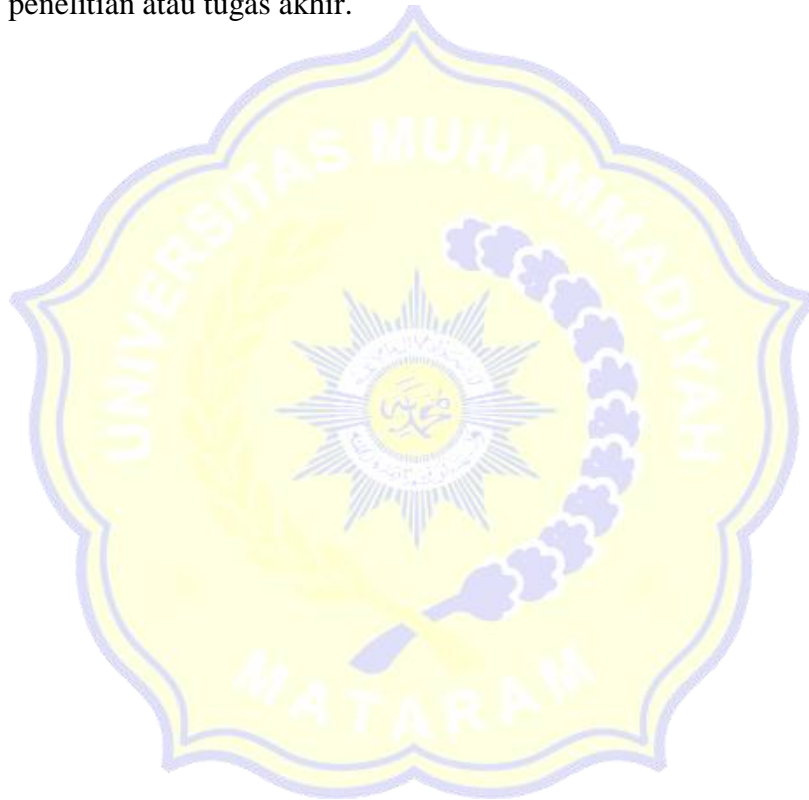
4. Struktur birokrasi yang dimiliki dinas perhubungan sudah ada dan harus melakukan koordinasi dengan baik dalam organisasi .

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah , adapun faktor pendukung tersebut yaitu pemerintah, para pengusaha, juru parkir maupun masyarakat yang menggunakan jasa parkir itu sendiri dan bisa dilihat titik area parkir yang ada maupun retribusi yang terus bertambah setiap tahun yang melampaui target.
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah bisa dikatakan sebagai faktor yang menghambat implementasi kebijakan yaitu ketersediaan fasilitas parkir yang belum memadai, lokasi parkir yang belum memadai, pengendalian dan pengawasan parkir belum optimal dan target yang diterapkan masih rendah, dan itulah faktor-faktor yang akan berpengaruh dan bisa menjadi penghambat dari implementasi kebijakan yang telah dibuat.

1.2 Saran

1. Perlunya penambahan aparatur pelaksana yang memiliki kemampuan dan pengetahuan khusus dalam mengatur parkir.
2. Perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara dinas terkait dan masyarakat terkait mengenai kebijakan parkir yang telah dibuat.
3. Keterbukaan dari dinas terkait perihal mahasiswa yang akan melakukan penelitian atau tugas akhir.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Brotodiharjo.,Santoso.(1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Darwin.,MBP. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Siahaan.,(2010). *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono.,(2013).*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Revida Erika,Dkk (2020).*Teori Administrasi Publik*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Tachjan,H.,(2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).
- Widodo,Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.

Perda:

- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Bupati Lombok Utara Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perparkiran.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 32 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Menjelaskan Parkir.
- Undang-Undang Pp Nomor 65 Tahun 2001 Bab 1 Pasal 1angka (16).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Pasal 1 Angka 18.

Undang-Undang No.23 Tahun 2010 Tentang Pendapatan Asli Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 Angka 64

Jurnal:

Darari Priya Setiaji,Dkk.(2019).*Implementasi Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kabupaten Tegal*.Jurnal Administrasi Publik.

Ismet Sulila,(2016) .*Implementasi Kebijakan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kota Gorontalo*.Jurnal Administrasi Publik.

Jusminarty,Dkk .(2016).*Pengelolaan Serta Kebijakan Retribusi Parkir Pantai Losari Makasar*.Jurnal Administrasi Public Volume 2 Nomor 1.

Mutiarani Kusuma Aninda,Dkk.(2014).*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Berdasarkan Perda No 2 Tahun 2012 Dikelurahan Krobokan Kota Semarang*.Administrasi Publik.

P.Heru prasetyo.,(2008). *Analisis penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus pada pemerintah kota Yogyakarta tahun 2003-2006)*

Roy Ardiansyah,Dkk.(2015).*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*.

Semdi J.E Sopbaba,Dkk.(2012).*Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap PAD* .Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol.1.No 2

Skripsi dan Tesis :

Fauzy As Syafiq,(2019). *Implementasi Kebijakan Pengoperasian Bus Trans Mataram Metro Di Kota Mataram*.(hal 82-96).

Fitria Ningsih.(2020). *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram*.(hal 31-44).

Irwan Dana.(2020).*Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018.*(Hal 1-2).

Riyan Iskandar.(2021).*Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.*(hal 5-15).

Rosni,(2021),*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2018 Di Kota Bima.*(halaman 22-25).

Syahrir.(2017).*Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah.*(Halaman 5).

Tampubolon, J., & Harianja, R. R. (2020). "ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PRESTASI ATLET SUMATRA UTARA (STUDI KASUS: DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATRA UTARA)" "Tesis, Sumatra Utara. Universitas HKBP Nommensen Medan.

Website:

<http://Bapenda.lombokutarakab.go.id> (Diakses 10-11-2021 jam 16.00 wita).

<https://Jdih.lombokutarakab.go.id> (diakses tgl 11-12-2021 jam 15.00 wita).

<http://jurnal.unigal.ac.id> (diakses tgl 21-12-2021 jam 11.30 wita).

<https://Repository.uhn.ac.id> (diakses tgl 22-12-2021 jam 09.34 wita).

<https://Peraturan.bpk.go.id> (diakses tgl 13-12-2021 jam 20.00 wita).

<https://www.Fitrantb.org/>(diakses tgl 22-12-2021 jam 17.00 wita)



Lampiran 1. Dokumentasi

Dokumentasi dengan bidang perhubungan darat

